

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENSEJAHTERAKAN GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA MALANG

Erika Ayuning Wulandari¹, Yaqub Cikusin², Retno Wulan Sekarsari³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Jl.

MT Haryono 193 Malang, 65144, Jawa Timur, Indonesia

Email: erikaayuningw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat dengan masalah ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Salah satu komponen dinamis dari kedudukan (status) adalah peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran jika ia memenuhi tanggung jawab dan haknya sesuai dengan perannya. Penelitian ini menggunakan Grand Teori Kesejahteraan Sosial, menurut Fahrudin (2012) Hal ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan di penelitian ini, di mana peneliti sebagai instrumen utama berperan aktif dalam menggali data dari sumber-sumber yang relevan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2023:15), Dengan berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti dalam lingkungan alaminya, pendekatan kualitatif berupaya memperoleh pemahaman fenomena secara menyeluruh dan mendalam. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Peran pemerintah adalah segala bentuk tanggung jawab, kewenangan, dan tindakan yang dilakukan. Melalui kebijakan tersebut, Dinas sosial menetapkan langkah-langkah penanganan, baik preventif maupun rehabilitatif. Seluruh proses ini dijalankan melalui koordinasi lintas sektor antara berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan relawan. Dapat disimpulkan dengan adanya Peran Dinas Sosial Kota Malang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial dapat dijalankan secara optimal namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Peran, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 dalam hal pertumbuhan penduduk di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan padat, dimana hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang dengan banyak permasalahan yang harus dihadapi. Akibat laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat akan berdampak pada segi lingkungan, segi kesehatan dan tidak hanya itu saja tetapi juga akan berdampak pada segi ekonomi, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara keseluruhan (spiritual dan material) dengan dasar Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Pasal 33 tahun 1945, di mana sebagai pondasi dasar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peranan atau kepedulian negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sangat penting dilakukan dan pembangunan demi meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian agar mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Di samping itu, dalam pembangunan penting melihat suatu aspek pembangunan dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Akan tetapi, proses

pembangunan sering kali terdapat ketidakseimbangan dalam pemerataan kesejahteraan hingga timbul ketimpangan.

Kota Malang merupakan enklave Kabupaten Malang yang berlokasi di dataran tinggi seluas 145,28 km². Kota Malang merupakan bagian dari Malang Raya, sebuah wilayah yang juga mencakup Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kota Malang, yang merupakan rumah bagi berbagai universitas bergengsi, dikenal sebagai kota pendidikan. Selain itu, kota ini ialah kota pariwisata sebab alamnya yang menawan yang dikelilingi pegunungan serta udaranya yang sejuk.

Jumlah penduduk Kota Malang mengalami peningkatan, yang dapat menimbulkan persaingan dan ketimpangan antara penduduk domisili dan penduduk urban. Selain itu, urbanisasi yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan dapat menimbulkan masalah pengangguran, sehingga banyak di antara mereka yang memutuskan menjadi gelandangan agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jenis PMKS Kota Malang tahun 2019–2020 adalah sebagai berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang
 Pengemis dan gelandangan diklasifikasikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Gelandangan didefinisikan oleh

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis PMKS dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)		
Jenis PMKS	Tahun	
	2019	2020
Anak Balita Terlantar	4	4
Anak Dengan Disabilitas	212	192
Anak Jalanan	84	24
Anak Terlantar	19	12
Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	11	31
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	15	5
Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	35	101
Korban Bencana Alam	263	0
JUMLAH	634	369

Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai orang-orang yang berkeliaran di jalanan, tidak memiliki tempat kerja atau perumahan tetap, dan hidup dalam kondisi yang jauh di bawah standar hidup minimum di komunitas mereka. Pengemis adalah mereka yang mencari nafkah dengan mengemis di ruang publik untuk berbagai tujuan dengan harapan mendapatkan belas kasihan orang lain.

Beberapa orang menjadi gelandangan karena berbagai alasan, termasuk masalah ekonomi, geografis, sosial, pendidikan, psikologis, budaya, lingkungan, dan agama yang mencegah mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang sejahtera.

Meskipun Pemerintah Kota Malang dan Dinas Sosial Kota Malang sudah berupaya keras untuk mengendalikan mereka di berbagai wilayah kota, keberadaan mereka masih tersebar luas. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah sosial, termasuk gelandang dan pengemis, yang keberadaannya semakin meningkat, meskipun pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Namun pemerintah tidak akan lepas tanggung jawab begitu saja untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakatnya, Tentu saja, masyarakat sipil, swasta, dan lembaga pemerintah lainnya terlibat dalam masalah gelandangan serta pengemis di Kota Malang. Mereka bekerja sama untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya fokus penelitian pada gelandangan serta pengemis.

Dari hasil pengamatan serta wawancara maka penulis menemukan GAP sebagai berikut:

1. Belum dilakukanya intervensi langsung terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Malang.
2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat terhadap Gelandangan dan Pengemis
3. Sulit mengubah minset/ pola pikir dan hidup mandiri

Bersumber latar belakang masalah, jadi peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Mensejahterakan Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dinas sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang?
3. Apa yang menjadi penyebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang
3. Untuk mengetahui penyebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota Malang

Tinjauan Pustaka

1. Kesejahteraan Sosial

Menurut (Fahrudin, 2014:8) Kata untuk kesejahteraan adalah "sejahtera". Istilah "Catera", yang berarti paying dalam bahasa Sanskerta, digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan ini. Menurut definisi ini, orang yang sejahtera adalah orang yang bebas dari kemiskinan, ketidaktahuan, ketakutan, atau kekhawatiran. Kehidupan orang tersebut aman dan tenteram, baik secara mental maupun fisik, dan kesejahteraan ini termasuk dalam definisi "catera" (payung). Sebaliknya, "socius" adalah asal kata "sosial" dan berarti kawan, sahabat, dan kerja sama.

2. Peranan Dinas Sosial

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012: 212), peranan ialah komponen status yang dapat berubah. Seseorang memainkan peran ketika ia menjalankan hak dan tanggung jawab yang disertai peranannya. Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, peran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat, bergantung pada jabatan atau kedudukan individu atau kelompok tersebut.

3. Pelayanan Publik

Melayani orang lain adalah definisi dari pelayanan. Melayani berarti memberikan layanan atau pengabdian yang profesional dan proposional (Hayat, 2017:21).

4. Gelandangan dan Pengemis

Menurut Murdianto (2012:16) gelandangan adalah orang-orang yang, meskipun hidup dalam kondisi yang tidak memenuhi standar kehidupan baik masyarakat setempat, tidak memiliki sumber daya untuk menghidupi diri sendiri, tidak memiliki rumah yang layak, dan status terhormat di masyarakat, namun masih berkeliaran di jalanan.

Menurut Irawan (2013), istilah "pengemis" sering digunakan untuk menggambarkan orang yang mendekati orang asing dan meminta makanan, tempat tinggal, uang tunai, atau kebutuhan lainnya.

Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan desain pendekatan kualitatif serta penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan untuk mengeksplorasi untuk mengetahui suatu keadaan yang terjadi secara langsung dengan mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti dan diuraikan didalam pembahasan.

Didalam Buku Sugiyono (2023:54) menjelaskan bagaimana penekanan penelitian kualitatif tidak hanya ditentukan oleh variabel penelitian tetapi juga oleh lingkungan sosial secara keseluruhan yang diteliti. Hal ini karena penelitian kualitatif akan membatasi penelitian karena permasalahannya terlalu luas.

Peneliti melakukan observasi langsung di Dinas Sosial Kota Malang, lokasi penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, alat penelitian berupa wawancara dan observasi. Selanjutnya, untuk memberikan penjelasan atas temuan penelitian, semua data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dikumpulkan.

Metode analisis data yang digunakan penulis ialah model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, serta verifikasi.

Teknik triangulasi digunakan di penelitian ini untuk menilai keabsahan sumber data yang dikumpulkan guna menjamin validitas data.

Pembahasan

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Mensejahterakan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Malang

Pemerintah khususnya Dinas Sosial berperan sangat penting dalam mensejahterakan gelandangan serta pengemis sebagai bagian dari usaha menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. peran ini dimulai dari penyusunan kebijakan yang mengatur tentang penanganan

gepeng. Melalui kebijakan tersebut, Dinas sosial menetapkan langkah-langkah penanganan, baik preventif maupun rehabilitatif.

Langkah awal yang dilakukan adalah pendataan dan identifikasi terhadap para gelandangan dan pengemis, agar diketahui kondisi, asal usul, dan kebutuhannya. Setelah itu mereka diarahkan ke rumah singgah atau panti sosial untuk mendapatkan rehabilitasi. Ditempat ini, mereka dibimbing secara mental, sosial, dan juga diberikan pelatihan keterampilan agar dapat mandiri secara ekonomi. Pemerintah juga menyediakan bantuan berupa makanan, pakaian, layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pemulangan bagi gelandangan serta pengemis yang berasal dari luar daerah serta membantu mereka untuk kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakatnya.

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mensejahterakan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Malang

Dalam usaha mensejahterakan gelandangan serta pengemis, berbagai faktor saling memengaruhi keberhasilan program-program sosial yang diterapkan. Dukungan dari pemerintah, misalnya, sangat penting melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan ini. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberian bantuan sosial, rehabilitasi, dan penyediaan tempat tinggal sementara menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam memperbaiki taraf hidup mereka. Peran keluarga juga menjadi kunci dalam upaya mensejahterakan gepeng. Ketika keluarga menerima kembali anggota mereka yang pernah hidup di jalanan, maka itu menjadi awal dari proses pemulihan jati diri dan semangat hidup.

Namun demikian, upaya mensejahterakan gepeng tidak terlepas dari berbagai hambatan yang cukup kompleks. Ketimpangan sosial, minimnya kesempatan kerja, dan biaya hidup yang tinggi memperparah kondisi mereka. Selain itu, pola pikir ketergantungan yang sudah terbentuk sejak lama membuat sebagian gepeng enggan menerima perubahan. Ketimpangan sosial, minimnya kesempatan kerja, dan biaya hidup yang tinggi memperparah kondisi mereka. Selain itu, pola pikir ketergantungan yang sudah terbentuk sejak lama membuat sebagian gepeng enggan menerima perubahan.

3. Apa Yang Menjadi Penyebab Masih Banyaknya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Malang

Penyebab masih banyaknya gelandangan serta pengemis di berbagai daerah merupakan persoalan sosial yang kompleks dan saling berkaitan. Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari akumulasi berbagai aspek yang saling memengaruhi. Salah satu penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Orang atau keluarga mencari cara langsung untuk mendapatkan uang, seperti menjadi pengemis, ketika mereka tidak dapat

memenuhi kebutuhan dasar termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu masalah selain masalah ekonomi. Banyak pengemis yang tidak pernah mengenyam pendidikan, dan banyak yang hanya mengenyam pendidikan formal sedikit atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Dengan demikian, mereka tidak memiliki bakat atau kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan data yang diperoleh oleh penelitian dapat disimpulkan 1. Dinas Sosial Kota Malang telah memberikan penyuluhan ini. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan menyusul razia yang menangkap gelandangan dan pengemis, serta melakukan penangkapan dan penertiban sementara di panti ataupun shelter.

Dalam rangka meningkatkan sikap dan perilaku anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup normal kembali, Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan berbagai lembaga, antara lain lembaga bimbingan dan konseling serta psikologi, untuk memberikan bimbingan dengan menyelenggarakan kelas-kelas tersendiri.

2. Kantor Dinas Sosial Kota Letaknya geografis disini sangat mendukung dalam menunjang peran Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan serta pengemis yang berada di Kota Malang dalam hal menangani permasalahan sosial. Dengan adanya pelayanan sosial dalam panti rehabilitasi diharapkan mereka mendapatkan pelayanan yang pantas dan layak dibandingkan berada di jalan ataupun di trotoar yang dinilai tidak layak untuk mereka tempati. adapun faktor penghambat pada penelitian ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan gelandangan dan pengemis. Ini adalah situasi di mana masyarakat tidak terlibat aktif dalam proses penanganan tunawisma dan pengemis. Masyarakat juga harus mendukung upaya ini. Jika masyarakat tidak memberikan bantuan keuangan atau keberatan kepada tunawisma dan pengemis, jumlah tunawisma dan pengemis akan menurun. Namun, warga Kota Malang memiliki rasa iba yang sangat tinggi, sehingga kita tidak dapat melarang mereka melakukannya. Terakhir, cara berpikir para pengemis dan gelandangan perlu diubah. Agar para gelandangan dan pengemis dapat meninggalkan jalanan dan memulai kehidupan yang lebih baik, diperlukan prosedur yang dapat mengubah pikiran, tindakan, dan perilaku negatif mereka menjadi baik.

3. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis ialah fenomena yang mencerminkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang menjadi penyebab masih banyaknya gelandangan serta pengemis di Kota Malang. Dalam banyak kasus, mereka hidup berpindah-pindah, tidur di emperan toko, kolong jembatan, atau trotoar, serta menggantungkan hidup dari belas kasihan orang

lain. Tanpa keterampilan, tanpa dukungan, dan sering kali tanpa dokumen kependudukan, mereka kesulitan mengakses bantuan sosial atau pekerjaan formal. Pada kenyataannya, banyak anak terlibat dalam perilaku mengemis karena orang tua mereka, yang melanggengkan masalah tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari sisi pemerintah dan masyarakat, kurangnya pengawasan serta belum optimalnya program pemberdayaan sosial juga memperpanjang keberadaan gepeng. Meskipun sudah ada program penertiban dan rehabilitasi, sering kali upaya tersebut tidak berkelanjutan atau tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga banyak gepeng kembali ke jalan setelah ditertibkan.

Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan peran Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan serta pengemis di Kota Malang, maka peneliti berharap agar direkomendasikan sebagai berikut:

Dalam hal ini harusnya pihak Dinas Sosial Kota Malang menyalurkan dan menempatkan gelandangan serta pengemis yang telah siap untuk bekerja di tempat yang memiliki atau membutuhkan pekerja sehingga mereka dapat langsung bekerja setelah pembinaan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Adiatma.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers
- Irawan, Dimas. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Murdiyanto, 2012. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial(PKSK) Di Daerah Tertinggal*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar, Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara-Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2023. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.